

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grasindo
- Anggraini, Y. d. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Arif, B. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi III. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2018. *Berita Resmi Statistik*. Diakses dari <http://sumbar.bps.go.id>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi VI. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi II. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Puspitasari, A. F. (2012). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2007-2011". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*
- Ramandei, P. (2009). *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura*. Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solom Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Rochmah, S. I. (2012). *Perbandingan Kinerja Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Janabadra

Ronald, A. d. (2010). Analisis Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol I*

Rosyada, D. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media

Sekaran, U. (2007). *"Metode Penelitian Bisnis I Edisi 4"*. Jakarta: Salemba Empat

Sekaran, U. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik. Edisi VI*. Yogyakarta: BPFE

Syamsudin, A. (2000). *Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Makalah. Kabupaten Bondowoso: Seminar Kadin-PWI

Widarta. (2001). *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

www.dharmasrayakab.go.id diakses pada tanggal 11 Mei 2019

www.pasamanbaratkab.go.id diakses pada tanggal 11 Mei 2019

www.solselkab.go.id diakses pada tanggal 11 Mei 2019